

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. PENELITIAN TERDAHULU**

Intan, (2017) Melakukan penelitian untuk melihat dampak dari informasi pajak pada PP No.46/2013 tentang menghormati WP orang pribadi yang ada di kota Malang. Adapun perbandingan sebelum dan setelah PP No. 46/2103 tentang penerimaan pajak di Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pengetahuan wajib pajak orang pribadi tentang Peraturan Pemerintah No. 1 memiliki efek positif yang signifikan. (2) Adapun untuk wajib pajak orang pribadi di kota Padang dalam pendapatan pajak sebelum dan setelah penerapan PP No. 46/2013 terdapat perbedaan yang signifikan.

Suryani, (2018) Melakukan Penelitian bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi Tingkat Pertumbuhan PP 23 2018 Terhadap Penerimaan Wajib Pajak UKM Dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). Penelitian ini termasuk dalam pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan tingkat pertumbuhan wajib pajak dengan signifikansi tertinggi 0,814 UKM kesimpulan lebih dari 0,05 maka tidak berbeda dengan tingkat pertumbuhan UKM wajib pajak sebelum dan sesudah pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018. Penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) ) dengan nilai kurang dari 0,05 signifikansi dari kesimpulan 0,011 maka tidak berbeda dengan tingkat pertumbuhan UKM wajib pajak sebelum dan sesudah pengalihan PP 46 dari 2013 menjadi PP 23 2018.

Sofyan, (2019).Direktorat Pajak terus menerus melakukan upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan menggali potensi penerimaan pajak UMKM dengan memperluas tingkat keikutsertaan wajib pajak

UMKM omset kurang dari 4.8 Milyar dengan menambah subyek pajak yang tidak ada perkecualian untuk bongkar pasang, menciptakan ekosistem perpajakan yang ramah, Pemetaan perpajakan yang mudah bagi UMKM pun terus disusun. telah terbit Peraturan Pemerintah baru yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018 yaitu PP 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013. UMKM merupakan wirausaha aktif yang dapat menggerakkan dan memanfaatkan sumber daya alam, modal dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja baru, penghasilan baru, sebagai penggerak kegiatan ekonomi, dan penghasil produk/jasa yang diperlukan masyarakat

(Wahyu Suryani, 2019) menunjukkan bahwa pada perkembangan atau pertumbuhan Wajib Pajak beserta diterimanya PPh yang bersifat Final di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan dihasilkan bahwa untuk peningkatan wajib pajak UMKM tidak beda peningkatan wajib pajak UMKM yang awal dan setelah pengalihan PP 46 tahun 2013 berubah PP 23 tahun 2018 sektor diterimanya PPh Final menghasilkan jika ada beda tingkat pendapatan diterimanya PPh Final awal dan setelah pengalihan Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018.

Tatik, (2018)((1) tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% dari omset cukup memberatkan bagi pelaku UMKM. Selain besarnya tarif pajak, ketidak pahaman mereka akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan SDM yang dimiliki untuk mengurus perpajakan juga menjadi kendala mereka dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak. (2) Pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di KPP Malang Selatan. (3) Responden yang merupakan pelaku UMKM di KPP Malang Selatan mengharapkan sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan

informasi yang lebih detail terkait peraturan perpajakan terbaru bagi UMKM.

## **2.2. LANDASAN TEORI**

### **2.2.1. Pengertian Pajak**

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengalami perkembangan diberbagai bidang. Hal tersebut terlihat pada pembangunan nasional yang tidak hanya dilakukan di perkotaan saja, namun sudah sampai pada berbagai pelosok daerah di Indonesia. Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan sumber dana untuk membiayai segala kebutuhan tersebut. Salah satunya yaitu berasal dari pajak, dimana saat ini pajak dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memaksimalkan pendapatan negara. Apabila membahas mengenai pengertian pajak, banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pajak tersebut. Diantaranya yaitu menurut (P.J.A Andrianidalam Tjendraputra, 2014)mengatakan bahwa: Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak merupakan sumber 15 utama penerimaan Negara, tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi:

- 1 Pembayaran gaji aparatur Negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.
- 2 Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Publik, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat

(BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

- 3 Pembangunan secara umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi.
- 4 Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Tjendraputra, Haiwei (2014:11) adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Adapun pengertian menurut Undang-Undang yang tertera pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

### **2.2.2. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Silahkan disimak berbagai fungsi pajak pada uraian di bawah ini.

#### **a. Fungsi Anggaran (Budgetair)**

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat

diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. **Fungsi Mengatur (Regulerend)**

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. **Fungsi Stabilitas**

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. **Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 2.2.3. Wajib Pajak

Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 2.2.4. Pengelompokan Wajib Pajak

Dalam pengelompokan Wajib Pajak, Wajib Pajak dibagi menjadi dua kelompok umum yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi atau WPOP dan Wajib Pajak Badan (WPB).

- **Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)**  
Berdasarkan tempat tinggalnya, Wajib Pajak Orang Pribadi dibagi menjadi dua yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri.
- **WPOP sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri**  
Menurut Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, WPOP sebagai subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- **WPOP sebagai Subjek Pajak Luar Negeri**  
Menurut Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, WPOP sebagai subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia dan orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183

hari dalam jangka waktu 12 bulan yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia (tidak dari menjalankan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap).

Sedangkan, berdasarkan status hubungannya, Wajib Pajak Orang Pribadi dibagi menjadi lima kelompok yaitu,

1. Orang Pribadi (Induk): Ditujukan untuk wajib pajak yang belum menikah atau seorang suami sebagai kepala keluarga.
  2. Hidup Berpisah (HB): Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena sudah hidup berpisah sesuai keputusan hakim.
  3. Pisah Harta (PH): Suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis sesuai perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
  4. Memilih Terpisah (MT): Wanita kawin selain yang termasuk dalam kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta
  5. Warisan Belum Terbagi (WTB): Ditujukan kepada pengganti bagi mereka yang berhak, yaitu ahli waris.
- a. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau kelompok yang bergabung dan bekerjasama dalam bentuk modal yang diwajibkan untuk terlibat dalam ketentuan perpajakan terlepas dari mereka melakukan usaha atau tidak melakukan usaha.

WPB meliputi:

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Perseroan Komanditer (CV)
3. Perseroan Lainnya
4. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

5. Firma
6. Koperasi
7. Kongsi
8. Persekutuan
9. Perkumpulan
10. Organisasi
11. Lembaga
12. Bentuk Badan Lain
13. Bentuk Usaha Tetap

#### **2.2.5. Kewajiban Wajib Pajak**

Setiap individu yang sudah bisa dikategorikan sebagai Wajib Pajak wajib untuk,

##### **a. Kewajiban Mendaftarkan Diri**

Seorang Wajib Pajak harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya berada di daerah Wajib Pajak.

##### **b. Kewajiban Untuk Melapor**

Wajib pajak wajib untuk melapor, membayar, atau memungut pajak yang terutang.

##### **c. Kewajiban Pemeriksaan**

Wajib pajak wajib bersikap kooperatif saat akan diperiksa dengan menunjukkan atau meminjamkan dokumen pendukung yang diminta oleh tim pemeriksa.

#### **2.2.6. Jenis Pajak Untuk Wajib Pajak**

Setiap tahun, wajib pajak akan dikenai empat jenis pajak secara umum, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai (BM).



- a. PPh, adalah sejenis pajak tahunan yang dikenakan kepada pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun.
- b. PPN, adalah pajak yang dikenakan terhadap konsumsi Barang Kena Pajak di Indonesia.
- c. PPnBM, adalah pajak yang dikenakan ketika seseorang atau wajib pajak mengonsumsi Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong merah.
- d. BM, adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen sejenis surat perjanjian, akta notaris, dan kwitansi.

#### **2.2.7. UMKM**

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Secara umum ciri ciri UMKM adalah : manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset

perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas.

Asas pelaksanaan **UMKM adalah** kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efesiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional.

#### 2.2.8. Kriteria UMKM

Untuk membedakan sebuah usaha apakah itu termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, oleh pemerintah diberikan batasan berdasarkan undang undang sesuai dengan kriteria jenis usaha masing masing yang didasarkan atas peredaran usaha dan atau jumlah aktiva yang dimiliki sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah:

Usaha Mikro juga memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000

b. Kriteria Usaha Kecil adalah:

Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.

c. Kriteria Usaha Menengah adalah:

Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000.

#### **2.2.9. Pengelompokan UMKM**

Dalam perkembangannya, UKM dapat dikasifikasi menjadi 4(empat) kelompok yaitu:

1. Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima
2. Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
4. Fast Moving Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)

#### **2.3.0. Metode Menghitung Pajak UMKM**

Menghitung pajak UMKM itu tinggal menjumlahkan omzet dalam sebulan, lalu dikalikan tariff 0,5%. Wajib dibayarkan tanggal 15 setiap bulan berikutnya. Karena baru efektif berlaku 1 Juli 2018, maka Wajib Pajak dengan omzet sampai juni yang disetorkan Bulan Juli masih dihitung 1%. Sementara untuk omzet bulan Juli yang pajaknya disetorkan pada bulan Agustus sudah menggunakan tariff 0,5% dikali omzet bulan Juli.

Wajib Pajak UMKM yang baru mendaftar bulan Juli 2018, dan setelahnya bisa langsung kena tariff 0,5% untuk omzetnya penyesuaian tariff secara otomatisasi tanpa persetujuan,

pemberitahuan atau surat apapun dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Setelah menghitung tarif jumlah UMKM tersebut maka Wajib Pajak wajib melaporkan pada pelaporan SPT tahunan meskipun dari pihak wajib pajak terdapat omzetnya yang tidak mencapai sesuai yang ditargetkan atau tidak menghasilkan apapun. Seluruh pembayaran tiap bulan dimasukkan ke kolom peredaran bruto PP 23. Total dari pembayaran tersebut dimasukkan ke form 1770-IV di bagian pendapatan final dari peredaran bruto.

### **2.3.1. Tolak Ukur UMKM**

- Usaha Mikro

Usaha Mikro memiliki tolak ukur tersendiri seperti:

1. Jenis barang usahanya tidak selalu tetap, sewaktu waktu dapat berganti, tempat usahanya tidak selalu menetap.
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat
3. Tidak melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak dapat memisahkan keuntungannya sendiri.
4. Sumber Daya Manusianya juga belum bisa memiliki jiwa wirausaha yang memadai
5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah
6. Umumnya tidak memiliki izin usaha dan persyaratan yang legalitas.

- Usaha Kecil

Usaha Kecil memiliki tolak ukur tersendiri, seperti:

1. Jenis barang usahanya yang sudah diusahakan umumnya sudah tetap tidak berubah-ubah.
2. Lokasi usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah.

3. Administrasi keuangan usahanya sudah dilakukannya meskipun itu sederhana dengan cara memisahkan uang keuntungan
4. Sudah memiliki izi usaha dan persyaratan yang legalitas.
- 5 Sumber Daya Manusia memiliki pengalaman atau memahami dalam hal berwirausaha.

- Usaha Menengah

Usaha Menengah memiliki tolak ukur tersendiri, seperti:

- 1 Memiliki menejemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur.
- 2 Telah melakukan manejemen keuangan dengan menerapkan system akuntansi.
- 3 Telak melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, adanya jamsostek, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya.
- 4 Memiliki izin persyaratan yang legalitas.
- 5 Sumber Daya Manusia yang terlatih dan terdidik.